

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Maghazi, Hadits No. 3073.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-12, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kartasapoetra, S. R. *Administrasi Negara dan Publik*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kristiana, Yudi. *Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-10, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Kitab Al-Imarah, Hadits No. 1831.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Padmo, Simon A. *Pidana Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Santoso, Budi. *Konsep Dasar Penyalahgunaan Wewenang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2014.

Tri Handayani. *Korupsi di Tingkat Desa*. Jakarta: LIPI Press, 2018.

Ulum, I.M. dan Dedi Muhammad Siddiq. *Islamic Studies*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Yunus, M. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

### **Skripsi / Karya Ilmiah**

Astuti, Dwi. “Pengawasan Internal Desa dan Penyalahgunaan Wewenang”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 1, 2021.

Hilmi, Rizqi Faridyan. *Problem Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang Terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Kayona, Eduardo dan Marcus Priyo Gunarto. “Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Kalurahan; Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Murbasari, M. G. “Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dalam Perspektif Hukum Pertanahan”. *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018.

Ramadhan, Taufiq. “Implementasi Hak Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarema-rem”. *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, April 2024.

Salsabila, Anisa dan Unggul Basoeky. “Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah”. Universitas Diponegoro, Semarang, 2023.

Sari, Kartika. “Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan di Wilayah DIY”. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2025.

Winadi, Enrico, Benedictus Renny See, dan Antonius Maria Laot Kian. “Tindak Pidana Korupsi Tanah Kalurahan di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3 No. 3, 2024.

Zidni, Irfan. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Penyalahgunaan Tanah Desa di Kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

## **Jurnal**

Alghifari, Habil dan Ayu Izza Elvany. “Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional”, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Amrani, Hanafi, “Unsur Subjektif Tindak Pidana Korupsi: Analisis *Dolus Specialis* dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2, 2022.

Astuti, Dwi. “Pengawasan Internal Desa dan Penyalahgunaan Wewenang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 1, 2021.

Huda, Ni'Matul. “Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, No. 13 Vol. 7, April 2000. Mudi. “Analisis Kepastian Hukum Atas Status Kepemilikan Tanah Kas Kalurahan Sebagai Aset Pemerintahan Desa”. *RIO Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2024.

Raharjo, Trisno, “Implikasi Hukum Pengelolaan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Kerugian Keuangan Negara”, *Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 3, 2022, hlm. 475–491.

Supama, Yusuf dan Imbiri. “Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 7 No. 2, 2024.

Wahyudi, Eko. “Sultan Ground dan Pakualaman Ground dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Az-Zarqa*, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 1, 2024.

Winadi, Edy. “Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Kalurahan di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2025.

“Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan”. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024.

#### **Website**

Harian Jogja. “Sosialisasi Pergub No. 24/2024: Unsur Pemerintahan Harus Memahami Regulasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan.” 28 Mei 2024

Kompas “Tanah Kas Kalurahan, Pengertian, Dasar Hukum, dan Aturan Pemanfaatan”. Diakses pada 17 Mei 2026.

Jaring.id “Sisa Masalah Penyewaan Tanah Desa”. Diakses pada 17 Mei 2026.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Fatwa MUI, Keputusan Musyawarah Nasional IV MUI tentang Korupsi, Suap, dan Hadiah, 25–29 Juli 2000.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30 April 2026.

Wawancara dengan Bapak Masyhud Ashari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 23 April 2026.

Wawancara dengan Inspektorat Bidang Pembantu Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 April 2026.

